

ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *FINANCIAL STATEMENT FRAUD* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019- 2021)

Murran Afif Wahyudi, Totok Dewayanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone; +622476486851

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence and to analyze the effect of Good Corporate Governance's mechanism such as board size of commissioners, board composition of independent commissioners, audit committee meeting, board of commissioners meeting, and managerial ownership on likelihood of financial statement fraud. The sampling method used in this study is purposive sampling method. Data collected from annual report. The data then analyzed using logistics regression analysis. The results of analysis this study indicate that board size of commissioners, composition of independent commissioners and managerial ownership have a significant negative effect on likelihood of financial statement fraud. While board of commissioners meeting have insignificant positive effect and managerial ownership have no significant effect on likelihood of financial statement fraud.

Keywords: financial statement fraud, good corporate governance

PENDAHULUAN

Skandal yang dialami oleh beberapa perusahaan besar yang berlangsung di tahun 2000 misalnya Tyco, Enron, Global Crossing, Adelphia, Williams Companies, WorldCom, Dynegy, JPMorgan Chase, Citicorp, AOL, Time Warner, dan Lucent Technologies merupakan salah satu momen yang melahirkan *Good Corporate Governance* menjadi isu penting (Tuanakotta 2007:235). Kasus manipulasi dan kebangkrutan yang menimpa perusahaan terkemuka di Amerika Serikat adalah suatu bukti bahwasannya *Good Corporate Governance* penting untuk diterapkan.

Kasus berkaitan dengan *fraud* yang sempat hangat salah satunya adalah kasus Garuda Indonesia. Kasus ini bermula saat dua komisaris Garuda yang dimana salah satunya merupakan mantan menteri perdagangan Chairul Tanjung menolak menandatangani laporan keuangan PT GIAA tahun 2018. Mereka skeptis terhadap transaksi kerja sama antara PT Citilink yang merupakan anak usaha dari GIAA dengan PT Mahata Aero Teknologi.

Permasalahannya adalah pihak PT Mahata Aero Teknologi sebenarnya belum membayarkan sepeserpun uang pada PT Citilink Indonesia untuk kerja sama tersebut, namun pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat telah dicatatkan oleh pihak manajemen GIAA. Pencatatan pendapatan yang dilakukan manajemen GIAA ini memiliki efek yang fantastis, GIAA yang semula merugi, berbalik membukukan laba bersih senilai \$809 ribu setara sekitar Rp11,33 miliar pada Laporan Keuangan Tahunan 2018.

Pelaksanaan penerapan tata kelola perusahaan yang kurang baik bisa menyebabkan kemungkinan terdapatnya *fraud* yang sukar terindikasi pada pihak pemilik kepentingan. Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* adalah instrumen guna mengatur direksi dan manajer (*insider*) supaya bekerja dengan baik serta penuh integritas guna keperluan kreditur luar (pemegang saham). Menurut Sutoyo dan Aldridge (2005) menjelaskan bahwa perusahaan publik yang

menerapkan *Good Corporate Governance* dapat menahan adanya praktik *fraud* atas laporan keuangan pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Berdasarkan IICG (The Indonesian Institute for Corporate Governance) mekanisme *Good Corporate Governance* digambarkan sebagai kumpulan sistematis guna memberikan jalan dan memberi kendali dalam perusahaan supaya tindakan perusahaan dilaksanakan sama seperti keinginan dan tujuan pihak pemangku kepentingan. Urgensi *Good Corporate Governance* lebih diutamakan setelah adanya kegagalan beberapa perusahaan terkemuka, skandal akuntansi, dan krisis ekonomi di beberapa negara.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori keagenan menjelaskan bahwasanya perpisahan kepemilikan serta kendali dalam mengelola suatu korporasi mendatangkan konflik kepentingan diantara manajer dan investor (Fama dan Jensen, 1983) yang merupakan area signifikan dari upaya tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah alat penting di pasar modal guna memperkuat rasa percaya investor bahwasanya bisnis berjalan dengan baik dan akan terus berhasil. Teori ini juga berpendapat bahwa masalah antara prinsipal dan agen menambahkan keperluan untuk mempunyai tata kelola perusahaan yang efektif guna melihat dan memegang kendali aktivitas manajemen (Shleifer dan Vishny, 1997).

Meningkatnya jumlah kasus *fraud* perusahaan menunjukkan bahwa masalah prinsipal-agen ini masih terjadi di banyak organisasi. Manajer bekerja bertentangan dengan etika organisasi, direksi gagal menjalankan peran pengaturan dan tanggung jawab dan pengawasan mereka adalah salah satu alasan yang dibahas dalam literatur. Akibatnya, prinsipal harus menemukan solusi dengan memahami mekanisme yang menyebabkan terjadinya *fraud* perusahaan dan mengembangkan kebijakan dan tata kelola perusahaan yang lebih baik

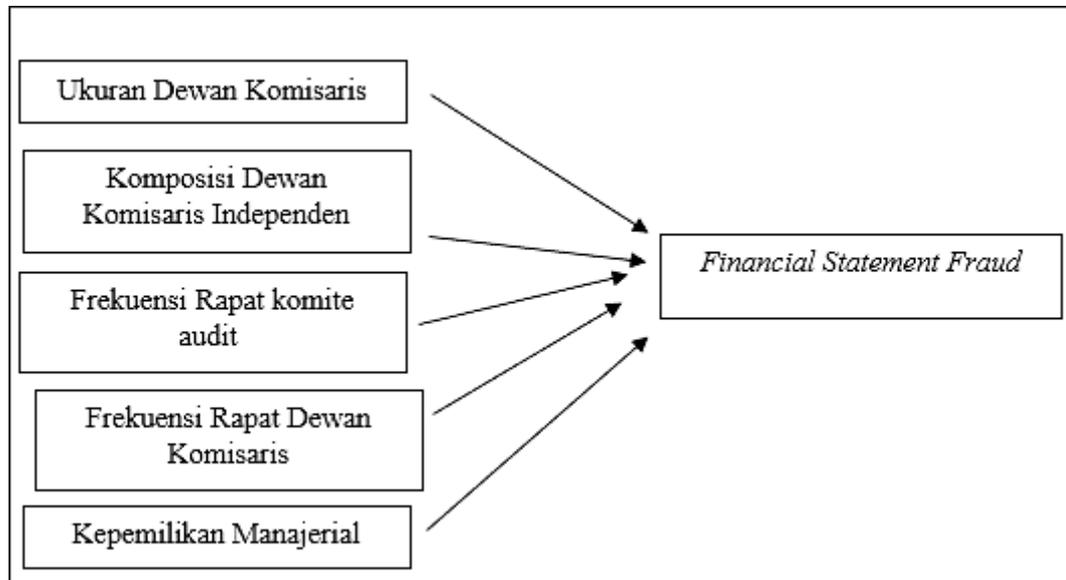
Kecurangan atau Fraud adalah tindakan yang dilarang oleh negara serta berakibat membuat rugi banyak pihak. *The Association of Certified Fraud Investigators (ACFE) dalam Ernst & Young (2009)* menemukan bahwa *fraud* dikaitkan dengan penipuan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang mengerti bahwasanya kesalahan itu bisa menguntungkan individu ataupun pihak lainnya. *Fraud* merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan yang menyebabkan salah penyajian material atas pelaporan keuangan dan menjadi pokok pemeriksaan audit (SAS No.99).

Mas Ahmad Danirii (2005:8) menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* ialah sebuah kesinambungan pola, suatu sistem serta proses yang dipakai pada badan perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham) untuk mencapai nilai pertambahan oleh pemegang saham, secara terus menerus pada jangka panjang, serta dapat memerhatikan agenda stakeholder lainnya, dengan menaati aturan dari undang-undang yang ada dan norma-norma dasar.

Dari penjelasan di atas bisa diartikan bahwasanya *Good Corporate Governance* adalah struktur yang mengatur harmonisnya pola kesinambungan mengenai peran direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan stakeholder lainnya dan pada akhirnya akan menghindari konflik keagenan yang menimbulkan biaya keagenan.

Berikut akan dijelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen melalui kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Financial Statement Fraud*

Dewan komisaris merupakan implikasi dari salah satu prinsip *Good Corporate Governance* dari KNKG yakni perilaku beretika. Keberadaan dewan komisaris dinilai mampu melindungi kepentingan dari pemegang saham maupun pemilik kepentingan lain dari sifat oportunistik dari manajemen perusahaan. Hal tersebut juga dapat mengatasi permasalahan dari teori agensi yakni *agency cost*.

Meningkatnya jumlah kasus penipuan perusahaan menunjukkan bahwa masalah prinsipal-agen ini masih terjadi di banyak organisasi. Manajer bekerja bertentangan dengan standar etika organisasi standar, direksi gagal menjalankan peran manajerial dan tanggung jawab. Akibatnya, prinsipal harus menemukan solusi dengan memahami mekanisme yang menyebabkan terjadinya *fraud* Perusahaan dan menerapkan *Good Corporate Governance*. Tata kelola perusahaan yang buruk menunjukkan tidak efektifnya mekanisme pemantauan dan pengendalian yang digunakan oleh suatu organisasi, yang akan membuka peluang bagi manajemennya untuk melakukan kecurangan (Ismail dan Abdelmoniem, 2013)

Pada studi yang dilaksanakan oleh (Girau, dkk.2022) yang membahas kesinambungan diantara *corporate governance* dan *fraud* di perusahaan di Malaysia. Peneliti menemukan beberapa unsur *corporate governance* seperti jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif atas keterjadian skandal *fraud*. Akan tetapi beberapa penelitian serupa memiliki hasil yang tidak konsisten, misal pada penelitian Shan, dkk. (2013) dan Zam, dkk. (2014) menemukan bahwasanya jumlah dewan komisaris serta dewan komisaris independen tidak mempunyai pengaruh atas *fraud* yang terjadi di perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap probabilitas *financial statement fraud*.

Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Financial Statement Fraud*

Demi mencegah terjadinya tindakan *fraud* pada perusahaan, maka perlu adanya suatu pengawasan dari posisi seperti dewan komisaris yang dapat mengawasi aktivitas dari perusahaan.

Sehingga guna menghindari adanya tindakan *fraud*, maka butuh pihak yang berlatar belakang dari luar emiten yang sifatnya independen yaitu dalam hal ini ialah dewan komisaris. Peran dari dewan komisaris sesuai pada prinsip *Good Corporate Governance* yakni transparansi dan akuntabilitas,

dimana dewan komisaris independen yang tidak terikat dan berasal dari luar perusahaan dinilai mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dari perusahaan

Jumlah dewan komisaris independen yang tinggi umumnya dianggap lebih efektif dalam memantau aktivitas manajemen dan memberikan kontrol keputusan yang lebih baik untuk kepentingan pemegang saham (Dechow et al., 1996). Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dengan persentase yang lebih besar memperlihatkan kemampuan kerja perusahaan yang lebih baik (Wu dan Li, 2014).

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kehadiran dewan komisaris independen dipandang sebagai mekanisme penting dalam *Good Corporate Governance* untuk meminimalkan insiden *fraud* (Uzun, dkk. 2004). Selain itu hasil studi dari Virk (2017) menemukan bahwasanya keberadaan dewan komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap *fraud*.

Namun beberapa studi menemukan hasil temuan berbeda yang dimana tidak ditemukan kesinambungan yang berarti diantara dewan komisaris independen dan *fraud* perusahaan (Shan dkk., 2013; Sadique dkk., 2019; Girau dkk., 2021). Ini menyiratkan bahwa hadirnya dewan komisaris independen tidak bisa sepenuhnya mencegah terjadinya *fraud* pada suatu perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Komposisi Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap probabilitas *financial statement fraud*.

Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap *Financial Statement Fraud*

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar prinsip *Good Corporate Governance* yang dimana hal tersebut ada pada komite audit. Keberadaan komite audit yang memiliki kemampuan dan pemahaman dalam bidang akuntansi dinilai dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan sehingga perusahaan menjadi lebih akuntabel. Kemungkinan terjadinya *fraud* pada perusahaan yang akuntabel tentunya jauh lebih kecil dibanding perusahaan yang tidak akuntabel.

Hasil studi di Amerika Serikat yang dilaksanakan oleh Beasley, dkk. (1999) di Amerika Serikat menemukan bahwa sebanyak 25% perusahaan yang terindikasi melakukan *fraud* tidak

memiliki komite audit. Selain itu Beasley juga menemukan fakta menarik yakni perusahaan yang terindikasi melakukan *fraud* umumnya melakukan rapat hanya setahun sekali. Selain itu Abbott dkk. (2000) menjelaskan bahwasanya komite audit yang melaksanakan pertemuan atau rapat minimal dua kali setahun menunjukkan tidak adanya kecurangan di suatu perusahaan. Dari dua penelitian tersebut mengindikasikan bahwasanya frekuensi rapat komite audit dapat memiliki pengaruh atas *fraud*.

Terdapat adanya pembahasan serupa namun hasil berbeda yang terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Sadique, dkk. (2019) dimana tidak ditemukan kesinambungan yang berarti diantara frekuensi rapat komite audit atas *fraud* yang terjadi di perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap probabilitas *financial statement fraud*.

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap *Financial Statement Fraud*

Dewan komisaris yang efektif harus mengadakan rapat pada interval tertentu untuk membahas permasalahan yang terjadi di perusahaan terkait kebijakan perusahaan, permasalahan yang mendesak dan strategi bisnis perusahaan di masa depan. Pertemuan ataupun rapat rutin akan memastikan semua anggota dewan komisaris mengetahui kegiatan bisnis dan masalah yang perlu ditangani. Frekuensi rapat dewan komisaris yang banyak dan beragam menunjukkan terjadinya pemantauan dan pengawasan yang maksimal kepada manajemen serta upaya dari dewan komisaris untuk menyelesaikan permasalahan perusahaan. Maka dari itu, rapat dewan komisaris hal itu bisa memperbaiki kemampuan kerja perusahaan (Lipton dan Lorsch, 1992)

Studi sebelumnya yang dilaksanakan oleh Chen, dkk. (2006), Salleh dan Othman (2016), Pan dan Hong (2017), Zhou, dkk. (2018) dan Sadique, dkk. (2019) dalam memeriksa hubungan antara frekuensi rapat dewan komisaris dan penipuan yang terjadi perusahaan, menemukan bahwa jumlah rapat dewan berhubungan positif yang berarti atas kemungkinan fraud. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya rapat dewan komisaris mengindikasikan tindakan fraud yang dialami di sebuah perusahaan.

Berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Kamardin dan Haron (2011) mereka berpendapat bahwasanya frekuensi rapat dewan komisaris tak mempunyai kepengaruh atas pelaksanaan peran pengawasan oleh dewan komisaris itu sendiri. Senada dengan temuan dari Kamardin dan Haron, hasil studi yang dilaksanakan oleh Girau, dkk. (2022) juga mendapatkan hasil bahwasanya total rapat yang dilaksanakan oleh dewan komisaris tak mempunyai kepengaruh atas keterjadian *fraud*.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4: Frekuensi rapat dewan komisaris memiliki pengaruh positif atas probabilitas *financial statement fraud*.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Financial Statement Fraud*

Presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh orang dalam perusahaan seperti dewan komisaris, direksi, manajer ataupun karyawan biasa adalah pengertian dari kepemilikan manajerial. Dengan mereka memiliki saham di perusahaan dimana mereka bekerja akan menimbulkan rasa ikut memiliki perusahaan, sehingga segala keputusan dan tindakan akan penuh perhitungan agar tidak merugikan perusahaan. Selain itu mereka akan lebih termotivasi bekerja untuk perusahaan sehingga kemungkinan terjadinya penyelewengan atau *fraud* semakin kecil.

Mengacu pada hasil studi dari Skousen, dkk. (2009) menemukan bahwasanya presentase kepemilikan saham orang dalam dapat memiliki pengaruh positif atas *financial statement fraud*. Akan tetapi terdapat studi serupa yang memiliki hasil berbeda, Chen dkk., (2006) mendapatkan fakta bahwasanya orang dalam yang mempunyai presentase kepemilikan saham yang tinggi dapat menurunkan kemungkinan terjadinya *fraud* atau dengan kata lain kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif atas *fraud*. Sedangkan menurut hasil penelitian dari Girau, dkk (2022) kepemilikan manajerial tidak memiliki hubungan atas terjadinya *fraud*.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5: kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap probabilitas *financial statement fraud*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, diantaranya adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu *Financial Statement Fraud* yang diukur dengan metode variabel dummy. Perusahaan dikategorikan dalam dua kategori, di mana perusahaan yang terindikasi melakukan *fraud* diberi angka 1, sementara perusahaan yang tidak terindikasi melakukannya diberi angka 0. Tingkat kesehatan perusahaan yang menjadi indikasi perusahaan melakukan *financial statement fraud* diukur menggunakan *P-Score*. Berikut adalah formula dari *P-Score*.

$$P-Score = 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,3 * X3 + 0,6 * X4 + 1,0 * X5$$

Keterangan:

$$X1 = \frac{\text{Shareholder Equity}}{\text{Total Assets}}$$

$$X2 = \frac{\text{Retained Earnings}}{\text{Total Assets}}$$

$$X3 = \frac{EBIT}{Total\ Assets}$$

$$X4 = \frac{Market\ Value\ of\ Equity}{Book\ Value\ of\ Total\ Debt}$$

$$X5 = \frac{Revenue}{Total\ Assets}$$

Ukuran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan bagian perseroan yang memiliki tugas melaksanakan *check and control* sesuai anggaran dasar yang telah ditetapkan secara keseluruhan maupun terkhusus serta memberikan arahan pada manajemen. Tanggung jawab yang dimiliki oleh Dewan Komisaris ialah demi kepentingan dari perusahaan serta mencegah segala bentuk benturan kepentingan pribadi. Tugas, kewajiban, wewenang, hak, pengangkatan maupun pemberhentian dari dewan komisaris ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Sederhananya dewan komisaris diberi tugas dan tanggung jawab terkait pengawasan kualitas kinerja manajemen dalam pelaporan keuangan didalam laporan keuangan. Pengukuran variabel ini diperoleh dari jumlah keseluruhan dari Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris Independen

Pada dasarnya dewan komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris namun memiliki latar belakang serta ketentuan yang menegaskan terkait independensi mereka. Penunjukan dewan komisaris independen yang dilaksanakan oleh perseroan berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 20 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwasanya perusahaan publik harus memiliki dewan komisaris dan dewan komisaris independen. Kemudian dalam ayat 3 menjelaskan terkait persentase dewan komisaris independen tidak kurang dari 30% dari keseluruhan dewan komisaris. Pengukuran variabel ini (DKI) diperoleh dari total dari komisaris independen dibagi total dari dewan komisaris.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris didalam mengawasi kegiatan usaha perusahaan, secara periodik melaksanakan pertemuan secara internal untuk berdiskusi mengenai dari pengawasan atas pengelolaan perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pertemuan atau Rapat Dewan Komisaris harus dilaksanakan minimal sebanyak 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Kegiatan atau agenda yang umumnya dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris yaitu adalah mengenai evaluasi terkait peengelolaan perusahaan, permasalahan atau kemungkinan penyelewengan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dan beberapa hal strategis lainnya. Pengukuran variabel ini diperoleh dari jumlah rapat dewan komisaris dalam satu tahun.

Frekuensi Rapat Komite Audit

Berdasar pada keputusan Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit terkait penyelenggaraan rapat komite audit tentang dasar rapat komite audit ialah diadakannya rapat komite audit secara teratur paling sedikit sekali dalam tiga bulan dan rapat komite audit sah dilakukan jika didatangi oleh lebih dari setengah dari jumlah peserta rapat. Variabel ini diukur dengan memakai total rapat komite audit.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan sebagian saham oleh dewan komisaris, direksi ataupun staff karyawan perusahaan. Melalui kepemilikan manajerial diharapkan dapat menjadi instrument untuk kontrol terhadap pelaporan keuanan (Skousen et al 2009). Struktur kepemilikan

saham dapat mencegah adanya suatu kecurangan. Saham sendiri adalah bukti adanya hak klaim atas aset perusahaan serta bukti hak kepemilikan yang dimiliki *shareholder* atas perusahaan. Pengungkapan kinerja keuangan perusahaan merupakan kebijakan manajerial yang bisa dipengaruhi oleh sebagian saham yang dimiliki eksekutif perusahaan. Cara penghitungan kepemilikan saham oleh orang dalam (KM) ialah dengan memakai total kepemilikan saham orang dalam dibagi total saham beredar.

POPULASI DAN SAMPEL

Riset atau penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur di Indonesia yang tercatat dalam BEI pada kurun waktu 2019-2021. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan yang sudah sejalan dengan syarat sampel yang sudah dijelaskan. Perusahaan sektor manufaktur akan dikecualikan dari sampel penelitian apabila tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Penjelasan syarat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur pada tahun 2019-2021, terdaftar serta aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian ini dimiliki oleh perusahaan, data tersebut diperoleh dari Laporan Tahunan masing-masing perusahaan.

METODE ANALISIS

Metode analisis regresi logistik adalah metode yang dipergunakan pada penelitian ini. Regresi logistik yaitu merupakan metode regresi untuk menguji terkait ada atau tidaknya suatu kemungkinan terjadinya variabel dependen sehingga bisa diperkirakan oleh independen (Ghozali 2018). Distribusi normal dalam variabel independen tidak dibutuhkan dalam metode regresi logistik. Selain itu uji heterokedastisitas, uji normalitas, dan uji asumsi klasik dalam variabel independennya juga tidak dibutuhkan dalam metode regresi logistik. Model regresi ini dikembangkan guna melakukan uji beberapa hipotesis yang sudah diformulasikan pada penelitian ini yaitu:

$$FSF = \alpha + \beta_1 UDK + \beta_2 DKI + \beta_3 RDK + \beta_4 RKA + \beta_5 KM + \epsilon$$

Penjelasan Variabel dummy, kode 1 (satu) diperuntukkan perusahaan yang mengalami adanya Probabilitas *Financial Statement Fraud*, kode 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak mengalami Probabilitas *Financial Statement Fraud*.

- α : konstanta
- β : koefisien variabel
- UDK : Ukuran Dewan Komisaris
- DKI : Dewan Komisaris Independen
- RDK : Rapat Dewan Komisaris
- RKA : Rapat Komite Audit
- KM : Kepemilikan Manajerial
- ϵ : koefisien error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Tabel 1

Hasil Perolehan Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2021	516
2.	Perusahaan sektor manufaktur yang tidak menyediakan data variabel	(82)
3	Jumlah Sampel	434

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FSF	434	-10,44	30,81	4,1161	4,83695
UDK	434	2	9	3,94	1,572
DKI	434	16,67	100,00	42,1496	11,42775
RDK	434	0	49	7,18	4,633
RKA	434	0	73	6,24	6,448
KM	434	0	73,92	6,9981	15,47768
Valid N (listwise)	434				

Sumber: Output IBM SPSS 26

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 3
Uji Variabel Regresi Logistik
Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	UDK	-,458	,079	33,881	1	,000	,632
	DKI	-,031	,011	8,644	1	,003	,970
	RDK	,229	,050	20,763	1	,000	1,258
	RKA	,016	,020	,669	1	,413	1,016
	KM	-,039	,010	15,094	1	,000	,962
	Constant	1,543	,622	6,148	1	,013	4,681

a. Variable(s) entered on step 1: UDK, DKI, RDK, RKA, KM.

Sumber: Output IBM SPSS 26

INTERPRETASI HASIL

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Financial Statement Fraud*.

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial statement fraud*. Hasil uji dalam tabel 3 menghasilkan nilai signifikansi 0,00 dan nilai tersebut tidak lebih besar dari 0,05. Berdasar hasil tersebut bisa dikatakan bahwasanya X1 berpengaruh negatif terhadap *financial statement fraud* atau hipotesis yang pertama (H1) **diterima**.

Penelitian yang diujikan oleh Sadique dkk (2019) konsisten dengan temuan dari penelitian ini,. Namun hasil penelitian Girau dkk (2022) menemukan hasil yang berbeda, di mana ia menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *financial statement fraud*.

Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Financial Statement Fraud*

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini adalah komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *financial statement fraud*. Hasil pengujian pada tabel 3 X2

menghasilkan nilai signifikansi 0,03 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil itu bisa dikatakan bahwasanya X2 berpengaruh negatif terhadap terhadap *financial statement fraud* atau hipotesis yang kedua (H2) **diterima**.

Hasil penelitian ini berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Girau, dkk. (2022) untuk perusahaan di Malaysia. Penelitian yang dilakukan Virk (2017) dan Uzun, dkk. (2004) menemukan hasil serupa dengan penelitian ini yang di mana keberadaan dewan komisaris independen terbukti dapat mengurangi adanya kemungkinan *financial statement fraud*.

Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap *Financial Statement Fraud*

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial statement fraud*. Hasil olah data regresi logistik menghasilkan nilai signifikansi 0,413 dan nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dari hasil itu dapat dikatakan bahwasanya X3 atau rapat komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *financial statement fraud* Sehingga dapat dikatakan hipotesis ketiga (H3) **ditolak**.

Penelitian (Sadique, dkk. 2019) juga sejalan dengan temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwasanya pertemuan atau rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *financial statement fraud*.

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap *Financial Statement Fraud*

Hipotesis keempat (H4) menyatakan frekuensi rapat dewan komisaris yang diproyeksikan dengan (RDK) berpengaruh positif terhadap *financial statement fraud*. Nilai signifikansi yang ditunjukkan sebanyak 0,000 yang memiliki arti bahwa nilainya kurang dari 0,05. Mengacu pada hasil tersebut dapat diartikan bahwa X4 berpengaruh positif terhadap terhadap *financial statement fraud* atau hipotesis keempat (H4) **diterima**.

Penelitian ini memiliki hasil temuan yang berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Girau, dkk (2022). Hasil penelitian ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Chen, (2006), Salleh dan Othman (2016), dan Sadique, dkk. (2019).

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Financial Statement Fraud*

Hipotesis kelima (H5) menyatakan bahwasanya kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap terhadap *financial statement fraud*. Hasil olah data regresi logistik pada tabel 3 menunjukkan nilai signifikansinya sebesar 0,000 artinya nilai tersebut tidak lebih besar dari 0,05. Berdasar pada hasil fakta empiris bisa dikatakan bahwasanya X5 memiliki hubungan negatif terhadap *financial statement fraud* atau hipotesis kelima (H5) **diterima**.

Temuan ini memiliki perbedaan hasil dengan temuan dari Girau, dkk. (2022) di mana Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap probabilitas *financial statement fraud*. Namun temuan penelitian ini selaras dengan hasil riset dari Chen, dkk. (2006).

KESIMPULAN

Mengacu pada hasil analisis dan interpretasi data penelitian pada bagian sebelumnya dimana peneliti telah mengajukan lima (5) hipotesis menunjukkan hasil dan kesimpulan adalah sebagai berikut.

Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif yang signifikan atas terjadinya *financial statement fraud*. Hubungan pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah dari dewan komisaris maka semakin kecil probabilitas terjadinya *financial statement fraud*. Dewan komisaris dengan jumlah yang besar membuat sudut pandang dari anggota dewan komisaris semakin beragam, sehingga hal tersebut dinilai baik serta mampu meningkatkan fungsi pengawasan yang benar. Apabila fungsi pengawasan berjalan dengan benar maka penerapan *Good Corporate Governance* bisa berjalan baik sehingga kemungkinan terjadinya *financial statement fraud* dapat diminimalisir

Hasil pengukuran dan pengujian komposisi dewan komisaris independen atas *financial statement fraud* menunjukkan adanya pengaruh negatif. Hal tersebut memiliki arti bahwasanya semakin besar jumlah dewan komisaris independen membuat probabilitas terjadinya *financial statement fraud* semakin kecil. Fungsi yang dimiliki dewan komisaris independen serupa dengan fungsi dewan komisaris, namun yang membedakan adalah dewan komisaris independen berlatarbelakang dari luar perusahaan. Hal tersebut membuat dewan komisaris independen dinilai mampu meningkatkan fungsi pengawasan dari dewan komisaris sehingga diharapkan mampu mencegah terjadinya *financial statement fraud*.

Hasil pengujian frekuensi rapat komite audit menunjukkan bahwa rapat komite audit tidak mempunyai pengaruh atas kemungkinan terjadinya *financial statement fraud*. Rapat yang dilaksanakan oleh komite audit bukanlah suatu mekanisme utama dalam upaya untuk mencegah terjadinya *financial statement fraud*. Hal itu disebabkan karena pemegang kunci utama kebijakan perusahaan atau *decision maker* bukanlah dari pihak komite audit melainkan dewan komisaris. Hal tersebut menciptakan suatu keadaan yang kontraproduktif karena hasil dari rapat komite audit belum tentu ditindaklanjuti oleh dewan komisaris, sekalipun itu mungkin dalam rangka pencegahan agar tidak terjadinya *financial statement fraud*. Frekuensi rapat dewan komisaris memiliki pengaruh atau hubungan positif atas kemungkinan terjadinya *financial statement fraud*. Hubungan positif memiliki arti bahwasanya semakin besar frekuensi rapat dewan komisaris maka semakin besar pula probabilitas *financial statement fraud*. Hasil dari temuan ini menunjukkan bahwa pertemuan atau rapat yang dilaksanakan oleh dewan komisaris merupakan suatu indikasi adanya permasalahan yang dialami perusahaan, dan masalah tersebut mengarah pada *financial statement fraud*.

Hubungan antara kepemilikan manajerial dengan probabilitas *financial statement fraud* memiliki pengaruh negatif. Hal tersebut artinya semakin besar kepemilikan manajerial atau presentase kepemilikan saham eksekutif perusahaan maka semakin kecil probabilitas terjadinya tindakan *financial statement fraud*. Hasil dari temuan ini menunjukkan bahwa dengan adanya kepemilikan saham oleh eksekutif perusahaan seperti dewan komisaris dan direksi, maka akan meningkatkan kinerja serta integritas. Hal tersebut merupakan suatu keadaan yang mendukung dalam implementasi dari *Good Corporate Governance* sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan *financial statement fraud*.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah metode dalam menentukan perusahaan terindikasi *financial statement fraud* atau tidak menggunakan P-Score, sedangkan banyak metode lain yang dapat digunakan sehingga mungkin saja bisa memiliki keakuratan yang lebih baik. Kedua sampel data diperoleh dari tahun 2019-2021 sehingga terdapat keterbatasan dalam variasi data, tidak menutup kemungkinan untuk mengambil rentang waktu yang lebih lama untuk menghasilkan keakuratan hasil yang lebih baik.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada pada penelitian ini, penulis memberikan saran untuk penelitian berikutnya. Pertama, Penelitian berikutnya bisa menggunakan data dengan klasifikasi waktu yang lebih banyak ataupun lebih dari tiga tahun dengan mengikuti tahun terbaru agar variasi data tidak mengalami kekurangan. Kedua, Menggunakan metode lain dalam mengukur variabel dependen *financial statement fraud* dengan akurasi yang lebih baik seperti mengambil informasi serta data perusahaan yang terbukti melakukan *financial statement fraud* dari otoritas terkait.

REFERENSI

- A. Girau, E., dkk. 2022. "Corporate governance challenges and opportunities in mitigating corporate fraud in Malaysia". *Journal of Financial Crime*. Vol. 29 No. 2, pp. 620-638.
- Abbott, L. J., dkk. 2000. "The Effects of Audit Committee Activity and Independence on Corporate Fraud". *Managerial Finance*. Vol. 26, No. 11: 55-67.

- ACFE, (2019), Survei Fraud Indonesia 2019, Acfe Indonesia (hal. 76), ACFE. Indonesia Chapter.
- Achmad, Mas Daniri. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia
- Aldridge, E.J. & A.S. Sutojo. 2005. *Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*. Damar Media Pustaka. Jakarta.
- Beasley, Mark. 1996. "An Empirical Analysis Between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud". *The Accounting Review*. Vol. 71, No. 4: 443-465.
- Chen, G., dkk. (2006), "Ownership structure, corporate governance, and fraud: Evidence from China", *Journal of Corporate Finance*. Vol. 12 No. 3, pp. 424-448.
- Dechow, P. A., R. G. dkk. 1996. "Causes and Consequences of Earnings Manipulation : An empirical of Firms Subject to Enforcement Actions by The SEC". *Contemporary Accounting Research*. Vol. 13 (Spring):1-36.
- Ernst & Young. 2009. "Detecting Financial Statement Fraud: What Every Manager Needs to Know," *E & Y LLP*. London, pp. 1-8. Diakses dari : www.ey.com
- Fama, E.F & Jensen, M.C., 1983. Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, Vol 26.
- Indonesian Institute for Corporate Governance, Available : www.iicg.co.id
- Ismail, T.H. & Abdelmoniem, Z. 2013. "Stock option fraud prevention in Islamic country: does corporate governance matter?". *Journal of Financial Reporting and Accounting*. Vol. 11 No. 1, hal. 4-28, doi: 10.1108/JFRA-03-2013-0013.
- Kamardin, H. & Haron, H. 2011. "Internal corporate governance and board performance in monitoring roles". *Journal of Financial Reporting and Accounting*. Vol. 9 No. 2, Hal. 119- 140.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2021. *Pedoman Umum GCG Indonesia*. Jakarta.
- Lipton, M. & Lorch, J. (1992). A modest proposal for improved corporate governance. *Business Lawyer*, 48, 59-77.
- Pan, W. and Hong, Y. 2017. "Characteristics of companies with financial fraud based on time-dependent COX model". *Journal of University of Science and Technology of China*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan.
- Pustylnick, I. 2009. Combined Algorithm for Detection of Manipulation in Financial Statements. *SSRN Electronic Journal*.
- Sadique, R.B.M., dkk. 2019. "Corporate governance attributes in fraud deterrence", *International Journal of Financial Research*. Vol. 10 No. 3. Hal. 51-62
- Salleh, S.M. and Othman, R. 2016. "Board of director's attributes as deterrence to corporate fraud", *Procedia Economics and Finance*. Vol. 35 No. 16, Hal. 82-91.



- Shan, Y.G., Graves, C. and Ali, H.H. 2013. "Effect of board composition and ownership characteristics on fraud evidence from Malaysian listed companies", *South East Asia Research*. Vol. 21 No. 2, Hal. 323-342.
- Shleifer, A dan R.W. Vishny. 1997. A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*. Vol. 52. No. 2 Juni. Hal. 737-783
- Skousen, C., dkk. 2009. "Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of the Fraud Triangle and SAS No.99". *Journal Advances in Financial Economics*. Vol. 13: 53- 81
- Tuanakotta, Theodorus M. 2007. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Uzun, H., dkk. 2004. "Board composition and corporate fraud", *Financial Analysts Journal*. Vol. 60 No. 3,
- Wu, X & Li, H, 2014. Board independence and the quality of board monitoring: evidence from China. *International Journal of Managerial Finance* Vol. 11 No. 3, pp. 308-328
- Zhou. Dkk. 2018. Delisting Pressure, Executive Compensation, And Corporate Fraud: Evidence from China. *Pacific-Basin Finance Journal*. Vol :48. Hal. 17–34